

Perlindungan Terhadap Hak Upah Pekerja Dan Keberlanjutan Bisnis Pelaku Usaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Ade Roni Zaeni Putra¹, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam kaitannya dengan perlindungan hak upah pekerja dan keberlanjutan bisnis pelaku usaha. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada pekerja dan pelaku usaha tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh PP Pengupahan.

Penulisan hukum ini ditulis dengan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang bersumber dari wawancara dengan narasumber dan responden untuk menjawab permasalahan seputar peraturan di bidang pengupahan yang berlaku di Indonesia. Data yang telah didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa PP Pengupahan di lapangan telah dilaksanakan dengan baik meskipun ada beberapa Peraturan Menteri yang dibutuhkan belum dibuat. Responden yang dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha pun keduanya sepakat bahwa PP Pengupahan di Kabupaten Bandung langsung dijalankan sejak tanggal diundangkannya. Berdasarkan hasil analisis fakta serta penggalian atas peraturan dan teori yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa PP Pengupahan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif serta dapat memberikan perlindungan bagi hak upah pekerja sekaligus bagi keberlanjutan bisnis pelaku usaha.

Kata Kunci: Keberlanjutan Bisnis, Ketenagakerjaan, Pekerja, Pengusaha, Upah.

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**Protection For the Right of Worker's Wages and Business Continuity Based on
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
in Kabupaten Bandung, Jawa Barat**

Ade Roni Zaeni Putra³, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.⁴

ABSTRACT

This thesis aims to explain the implementation of *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan* in relation to the protection for the right of worker's wages and business continuity. Hopefully, this thesis can provide insight to the community, especially the workers and businessman, about the protection afforded by *PP Pengupahan*.

This thesis was written with empirical-juridical approach that combines the literature research and field research were spurred from interviews with informant and respondents to answer the question about the wages regulation problem in Indonesia. The data that have been obtained then collected to be analyzed qualitatively.

Based on the results of the study, found that the regulations have been implemented well although there are some rules that have not been made by the minister. Respondents in this case are also both workers and businessman agreed that *PP Pengupahan* in Kabupaten Bandung has been implemented from the date of promulgation. Based on analysis of facts that based on the theory and regulations, it can be concluded that *PP Pengupahan* had been implemented properly and effectively. *PP Pengupahan* also can provide the protection for the right of worker's wages and business continuity for businessman.

Keywords: Business Continuity, Businessman, Labour, Wages, Workers.

³ Labour Law Student, Private Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University

⁴ Labour Law Lecturer, Private Law Department, Faculty of Law, Gadjah Mada University